



DINAS PERHUBUNGAN

DOKUMEN RENJA AKHIR 2025

KOTA PEKALONGAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Sistematika Penulisan.....	1
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	6
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	6
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	16
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	17
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	26
BAB V. PENUTUP	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah wajib menyusun rencana pembangunan tahunan. Rencana pembangunan tahunan dimaksud diwujudkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Program Strategis Nasional, RKPD Provinsi, serta dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sejalan dengan dasar pikir di atas maka Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025 menyusun Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025, merupakan Rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Pekalongan dalam urusan Perhubungan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud kegiatan penyusunan Renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2025. Tahun 2025 merupakan tahun keempat RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan RPJMD tersebut, maka Visi yang harus diwujudkan yaitu, **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat tujuh misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.
3. Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman.
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan.
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses Rencana Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pada dokumen Rencana Kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Terdapat 2 (dua) program yang menjadi urusan wajib Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam mewujudkan visi Dinas Perhubungan yakni ***“Terwujudnya Profesionalisme dalam Pelayanan dan Pengembangan Sistem Transportasi yang Lancar, Aman dan Efektif”***, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Tahun 2022 merupakan kedua pada periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan 2021-2026 dan mendasar hasil evaluasi RKPD tahun 2024 yang telah dilaksanakan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sudah melaksanakan seluruh program dan kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

Secara umum realisasi capaian program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat realisasi capaian Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Terdapat Program/Kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan;
- c. Terdapat Program/Kegiatan yang sesuai target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi capaian Program/Kegiatan tahun 2025 secara lebih rinci akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perubahan RPJMD 2021)	Realisasi 2021	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2023	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2023	Realisasi 2023			
1	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)	ratio	0.44	0,44	0,49	0.44	0.44	0.44	100	Tercapai
2	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	94	90	124,7	92	164,69	164,69	179,01	Melampaui
3	Persentase Peningkatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang Melaksanakan Uji Berkala	persen	0,76	0,76	(4,90)	0,75	(9,9)	(9,9)	(1,3)	Belum Tercapai
4	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
6	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai

Indikator persentase ketersediaan laporan capaian kinerja, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah telah mencapai target sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini didukung oleh sumber daya manusia Dinas Perhubungan yang kompeten dan bertekad untuk menyelesaikan program/kegiatan sesuai target yang telah ditentukan.

Diketahui dari tabel di atas, indikator kinerja lalu lintas kabupaten/kota telah melampaui target, dimana V/C Ratio semakin kecil atau mendekati angka 0 (nol) maka suatu jalan semakin baik kinerja arus lalu lintasnya atau dianggap tidak terjadi kemacetan. Hasil perhitungan V/C Ratio jalan perkotaan di Kota Pekalongan sebesar 0,44 dari target yang ditetapkan sebesar 0,44. Dari hasil diatas maka tingkat kemacetan jalan perkotaan di Kota Pekalongan mencapai batas nilai *Level Of Service (LOS) B*. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan arus lalu lintas meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga perlu untuk meningkatkan penggunaan kapasitas jalan agar arus lalu lintas semakin lancar

Sementara itu, indikator persentase kendaraan bermotor wajib uji yang melaksanakan uji berkala dan persentase peningkatan fasilitas LLAJ belum mencapai target Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan. Pada tahun 2024 ini pelaksanaan uji berkala juga sudah tidak berbayar, dengan adanya Uji Kir gratis diharapkan jumlah kendaraan yang melaksanakan uji meningkat dari tahun sebelumnya.

Target capaian kinerja yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2024. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan yaitu meski masih ada masalah dalam mencapai target tersebut ini dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya adanya pengurangan atau rasionalisasi dari anggaran yang telah ditetapkan dalam RKPD sebelumnya. Dengan adanya rasionalisasi target yang semula tercantum tinggi tidak diturunkan seiring dengan adanya pengurangan anggaran. Dan ini menyebabkan capaian realisasi pada sebagian kegiatan tidak bisa mencapai target.

Dari hasil evaluasi tersebut, maka perlu memperhatikan faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut, di antaranya:

- a. Penetapan indikator keluaran kegiatan pada tahap perencanaan agar lebih cermat lagi, sehingga bisa benar-benar mewakili output dari kegiatan dan bisa tercapai dengan baik;
- b. Renja perubahan diperlukan untuk mengantisipasi perubahan beberapa kondisi atau kebijakan yang perlu ditindaklanjuti, sehingga kinerja kegiatan bisa mencapai 100%;
- c. Penetapan kinerja kegiatan agar memperhatikan hasil capaian kinerja tahun lalu sehingga pencapaian yang terlalu tinggi (melebihi 100%) dan terlalu rendah (dibawah 90%) dapat dihindari.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi pencapaian IKK (Indikator Kinerja Kunci) Dinas Perhubungan selama periode Renstra Kota Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel T-C.30 berikut ini.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Indikator Program/Kegiatan	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (IKK Outcome)			0.52	0.44	0.44	0.44	0.39	0,44	0.44	0.44	
1	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah pembinaan dan pengawasan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			180	180	180	180	180	90	180	180	
3	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan			89	89	90	92	127,3	164,69	92	92	
4	Persentase pelaksanaan kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)			83	83	83	83	100	133,3	83	83	
5	Jumlah kegiatan Audit Inspeksi Keselamatan LLAJ yang dilaksanakan			2	2	2	2	2	2	2	2	
6	Jumlah jenis angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang difasilitasi			1	3	3	3	3	3	3	3	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan;
- b. Kebijakan kebijakan pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak tetap sehingga adanya penyesuaian terhadap pelaksanaan dari pada kebijakan kebijakan yang ada berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- c. Kegiatan prioritas yang tidak masuk pada usulan untuk tahun berikutnya namun harus dilaksanakan pada tahun ini dimana kegiatan kegiatan tersebut untuk mempercepat pencapaian visi dan misi Kota Pekalongan.

Isu isu strategis yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ke depan yaitu :

- a. Tingginya hambatan samping di jalan yang mengurangi kapasitas jalan;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan angkutan umum;
- c. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis;
- d. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (Marka, Rambu, Guardrail, RPPJ, Barrier, Lampu PJU) dikarenakan Keterbatasan APBD Kota Pekalongan;
- e. Adanya tumpang tindih kewenangan dikarenakan di lokasi rencana pembangunan Terminal Tipe C tersebut juga dilewati trayek Angkutan AKDP;
- f. Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasar pada hasil rancangan awal RKPD 2025 terdapat beberapa kebutuhan yang perlu ditambahkan agar memenuhi kinerja pelayanan transportasi perkotaan secara maksimal. Berikut sub kegiatan yang berubah diantaranya :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik meningkat dari Rp. 12.052.836.000 menjadi Rp. 15.547.050.000, hal ini meningkat karena adanya penambahan unit kendaraan dinas.
- b. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 519.179.000 menjadi Rp. 611.305.000 , meningkat guna penambahan jumlah prasarana jalan.
- c. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 1.302.000.000 menjadi Rp. 2.603.751.000 meningkat guna penambahan perlengkapan jalan.
- d. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota sebesar Rp. 20.000.000 menjadi Rp. 25.000.000.

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.741.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.741.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.763.000	
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.024.200	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.024.200	
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.536.661.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang/bulan	4.536.661.000	
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.695.800	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	86.695.800	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	
7.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	1 Laporan	127.450.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan	1 Laporan	127.450.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Barang Milik Daerah pada SKPD		Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			
8.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	10.000.000	
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	92.000.000	
11.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	
12.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	315.000.000	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	153.200.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	153.200.000	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 bulan	2.680.000	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	87.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	87.500.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	192.550.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pekalongan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	192.550.000	
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.547.050.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.547,050.000	
19.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.228.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	350.228.000	
20.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	349.066.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	349.066.000	
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	240.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	240.400.000	
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	92 unit	64.295.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	92 unit	64.295.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
23.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000	
24.	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	2.973.280.000	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	2.973.280.000	
25.	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	150 unit	611.305.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	150 unit	611.305.000	
26.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	9 unit	2.603.751.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	2.603.751.000	
27.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	59 Unit	1.000.000.000	
28.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	300.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Pekalongan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 Unit	300.000.000	
29.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pekalongan	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 dokumen	60.00.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	2 unit	30.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Kota Pekalongan	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terpelihara	2 unit	30.000.000	
31.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	400.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	400.000.000	
32.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3014 unit	132.010.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	3014 unit	132.010.000	
33.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 dokumen	103.420.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4000 dokumen	103.420.000	
34.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	102.184.000	
35.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	1 Laporan	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala	1 Laporan	10.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kendaraan Bermotor					Kendaraan Bermotor			
36.	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	34.269.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	34.269.000	
37.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	25.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	25.000.000	
38.	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	600.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	600.000.000	
39.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.000.000	
40.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	2 Laporan	25.000.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi	2 Laporan	25.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			
41.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	9.600.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	9.600.000	
42.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	31.000.000	
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	13.500.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	13.500.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut hasil dari musrenbang Kota Pekalongan tahun 2025 terdapat beberapa pokir yang diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diantaranya disajikan tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota
Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Industri Gamer	- 1 lokasi – 18 titik - Rp. 121.287.000	Pokir 2025
2	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kusuma Atmaja	-1 lokasi- 20 titik – Rp 134.905.000	Pokir 2025
3	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Seroja	-1 lokasi - 20 titik – Rp 94.500.000	Pokir 2025
4	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Madura	-1 lokasi – 17 titik - Rp 107.100.000	Pokir 2025
5	Pembangunan Prasarana jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Antasari Gamer	-1 lokasi – 6 titik – Rp 37.800.000	Pokir 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Secara umum Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Perhubungan memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, berdimensi kewilayahan (per pulau) dan telah menyesuaikan dengan Restrukturisasi dan Reformasi Program dan Kegiatan Pembangunan. Berdasarkan Renstra tersebut ditetapkanlah Visi yang merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Perhubungan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun Visi Kementerian Perhubungan adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan Yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah”

Penjelasan dari Visi ini yaitu :

- a. Pelayanan Perhubungan yang handal, yaitu penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- b. Pelayanan Perhubungan yang berdaya saing, yaitu penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif.
- c. Pelayanan Perhubungan yang memberikan nilai tambah, yaitu penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mempertahankan Tingkat Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Perhubungan. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititik beratkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Selain itu, dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi di tengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan.
- b. Melaksanakan Konsolidasi melalui Restrukturisasi dan Reformasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Melalui restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi semakin memperjelas peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Restrukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasan global dengan tetap mempertahankan jati dirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa Perhubungan. Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah.

- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan Yang Handal dan Memberikan Nilai Tambah. Pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. Untuk itu dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah harus dapat mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

Pernyataan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan memberikan arahan bagi daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perhubungan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan di Bidang Perhubungan, yaitu :

- a. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), membenahi sistem keselamatan dan keamanan, penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan, peningkatan kualitas SDM transportasi, serta pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan.
- b. Pembenahan regulasi dan mengoptimalkan Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hukum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi di Kota Pekalongan.
- c. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi dengan melakukan penataan moda transportasi Darat dan Sungai, serta jenis dan mekanisme transportasi di Kota Pekalongan.
- d. Peningkatan kinerja pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat sehingga tercipta kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang di Kota Pekalongan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dalam program dan kegiatannya mendukung misi Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah, meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi, dimana sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu persentase layanan jaringan distribusi transportasi orang dan atau barang, persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi dan persentase kenyamanan dan kehandalan angkutan umum. dengan sasaran jangka menengah adalah:

- a. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- b. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah;

- c. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana;
- d. Rancangan Pergub Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2025 transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi;
- f. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari suatu organisasi yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi organisasi. Faktor faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur-unsur perencanaan strategis. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi.

Arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius			
MISI IV : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Pemenuhan dan pengoptimalan Sarana dan Prasarana Perhubungan
			Peningkatan capaian Kinerja Lalu lintas
			Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
MISI VII : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Meningkatan kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Mutu dan Kualitas Laporan Capaian Kinerja Dinas Perhubungan
			Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Perhubungan
			Peningkatan Mutu dan Kualitas pengadaan/ pemeliharaan Barang Milik Daerah

- a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - 1) Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan.
 - 2) Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - 3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- b. Dasar dalam menetapkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan tentunya berdasarkan telaahan dan analisa dari Visi, Misi Walikota serta telaahan dari Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra dari Dinas Perhubungan. Dengan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terjadi penyesuaian untuk penyelarasan kinerja pada tahun 2025. Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai rancangan awal RKPd adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Keuangan
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

- Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
- 7) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalin
- 8) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
- 9) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota.
- b. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Pekalongan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja yang disusun	Kota Pekalongan	3 dokumen	3.741.000	APBD	-	2 dokumen	3.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.763.000	APBD	-	2 dokumen	2.500.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 Laporan	16.024.200	APBD	-	15 Laporan	16.000.000
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	40 orang/bulan	4.536.661.000	APBD	-	40 orang/bulan	4.839.000.000
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	86.695.800	APBD	-	12 dokumen	86.000.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.634.000	APBD	-	1 Laporan	2.000.000
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pekalongan	1 Laporan	127.450.000	APBD	-	1 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pekalongan	1 Paket	5.000.000	APBD	-	1 Paket	160.000.000
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	5.000.000	APBD	-	4 Paket	5.000.000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	92.000.000	APBD	-	4 Paket	75.000.000
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	12.881.000	APBD	-	4 Paket	7.500.000
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Paket	315.000.000	APBD	-	4 Paket	325.000.000
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 Paket	153.200.000	APBD	-	2 Paket	170.000.000
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.680.000	APBD	-	2 dokumen	2.500.000
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	100 Laporan	87.500.000	APBD	-	100 Laporan	100.000.000
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pekalongan	4 Unit	192.550.000	APBD	-	4 Unit	165.887.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	4 Laporan	1.800.000	APBD	-	4 Laporan	2.000.000
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	15.547.050.000	APBD	-	12 Laporan	12.318.531.000
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pekalongan	12 Laporan	350.228.000	APBD	-	12 Laporan	321.000.000
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	33 Unit	349.066.000	APBD	-	33 Unit	300.000.000
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	3 unit	240.400.000	APBD	-	3 unit	350.000.000
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pekalongan	92 unit	64.295.000	APBD	-	92 unit	40.000.000
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1 Dokumen	40.000.000	APBD	-	1 Dokumen	65.000.000
24	Penetapan kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ	Kota Pekalongan	38 Dokumen	2.973.280.000	APBD	-	38 Dokumen	2.900.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kabupaten/Kota							
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Pekalongan	150 unit	611.305.000	APBD	-	150 unit	500.000.000
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pekalongan	9 unit	2.603.751.000	APBD	-	9 unit	790.000.000
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pekalongan	59 Unit	1.000.000.000	APBD	-	59 Unit	1.214.000.000
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Pekalongan	12 Unit	300.000.000	APBD	-	12 Unit	300.000.000
29	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Kota Pekalongan	1 dokumen	60.000.000	APBD		1 dokumen	50.000.000
30	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Kota Pekalongan	2 unit	30.000.000	APBD	-	2 unit	100.000.000
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	4 laporan	400.000.000	APBD	-	4 laporan	400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Pekalongan	3014 unit	132.010.000	APBD	-	3014 unit	25.000.000
33	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	4000 dokumen	103.420.000	APBD	-	4000 dokumen	170.000.000
34	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Pekalongan	9 unit	102.184.000	APBD	-	9 unit	104.000.000
35	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pekalongan	1 Laporan	10.000.000	APBD	-	1 Laporan	15.000.000
36	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 Dokumen	34.269.000	APBD	-	3 Dokumen	32.000.000
37	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	3 Laporan	25.000.000	APBD	-	3 Laporan	30.000.000
38	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Kota Pekalongan	12 Laporan	600.000.000	APBD	-	12 Laporan	440.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Pekalongan	4 Laporan	15.000.000	APBD	-	4 Laporan	15.000.000
40	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	2 Laporan	25.000.000	APBD	-	2 Laporan	20.000.000
41	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Pekalongan	2 Laporan	9.600.000	APBD	-	2 Laporan	10.000.000
42	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	1 Laporan	31.000.000	APBD	-	1 Laporan	25.000.000
43	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Pekalongan	20 Unit	13.500.000	APBD	-	20 Unit	25.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing – masing SKPD pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Program dan kegiatan dalam Renja Dinas Perhubungan masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Renja Dinas Perhubungan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan merupakan tahapan akhir yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Dinas Perhubungan yang definitif dan merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan yang proses penyusunannya mengacu pada rancangan akhir Dinas Perhubungan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan perlu membentuk tim penyusun Renja Dinas Perhubungan yang bertugas melaksanakan seluruh proses penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan sampai dengan penyusunan RKA – SKPD. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir Dinas Perhubungan.

Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir Dinas Perhubungan, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, evaluasi pelaksanaan Renja Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Penyusunan Renja SKPD sebagaimana diatur dalam PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010 memiliki beberapa tahapan, antara lain :

- a. Persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan;
- b. Penyusunan RENJA Dinas Perhubungan;
- c. Pelaksanaan Forum Dinas Perhubungan; dan
- d. Penetapan Renja Dinas Perhubungan.

Persiapan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja SKPD;
- b. Orientasi mengenai Renja Dinas Perhubungan;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renja Dinas Perhubungan; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan disusun :

- a. Mengacu pada rancangan akhir Dinas Perhubungan;
- b. Mengacu pada Renstra Dinas Perhubungan;
- c. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. Berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

- a. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS

dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.

- c. Renja Dinas Perhubungan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak akhir tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 antara lain :

- a. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
- b. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- c. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- d. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Jumlah Anggaran dalam Renja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan tahun 2025 terdapat 2 Program Rutin dan Non-Rutin yaitu 14 Kegiatan 42 Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.084.256.000,- (dua puluh sembilan milyar delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

BAB V

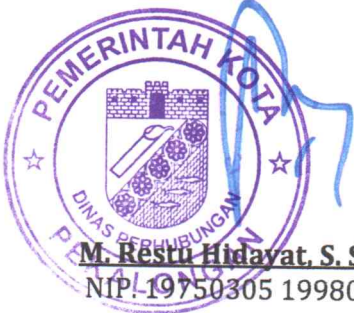
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Akhir Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Secara kontinyu dokumen ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Pekalongan , 8 Agustus 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan



M. Restu Hidayat, S. SiT., M.T
NIP. 19750305 199803 1 005